

## BAB II

### HUBUNGAN KERJA SAMA INDONESIA-JERMAN DAN PARADIPLOMASI KOTA BANDUNG

Melalui bab ini, akan menjelaskan terkait bagaimana paradiplomasi oleh pemerintah daerah dapat terjadi terutama di Kota Bandung itu sendiri serta landasan dan juga prosedur birokrasi yang dilalui pemerintah daerah dalam mengajukan kerja sama dengan mitra luar negeri. Selain itu, di dalam pembahasan ini akan mendalami terkait hubungan bilateral Indonesia-Jerman sebagai dasar dari terciptanya ruang kerja sama tingkat lokal. Hubungan bilateral kedua negara yang terjalin dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lainnya, memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk berperan dalam hubungan luar negeri. Dalam hal ini, Kota Bandung menjadi salah satu aktor aktif yang menjalankan paradiplomasi demi mendukung pembangunan daerahnya. Salah satu bentuknya ialah kerja sama *sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig.

#### 2.1 Hubungan Bilateral Indonesia dan Jerman

Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan negara-negara lain dimulai begitu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dalam forum seperti bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia kerap mempromosikan kehidupan masyarakat yang saling menghormati, tidak ikut campur dalam urusan negara lain, menolak penggunaan kekerasan dalam proses pengambilan keputusan. Dan kini, tercatat pada tahun 2025, Indonesia telah

menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu *non-self governing territory* yaitu Palestina. Yang mana, terbagi kedalam delapan kawasan, di antaranya Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, Tengah, dan Timur.<sup>32</sup>

Sejarah yang dimiliki dalam hubungan antara Jerman dan Indonesia dapat dilihat melalui aspek maritim yang dilakukan oleh penjelajah Jerman pada masanya, diantaranya Bathasar Sprenger yang menulis terkait Indonesia di tahun 1509 dengan judul *Merfahr* atau perjalanan laut.<sup>33</sup> Kemudian seorang ahli etnologi asal Jerman bernama Adolf Bastian menjadi orang pertama yang mengemukakan istilah “Indonesia”. Dan jauh sebelum kemerdekaannya, istilah tersebut ia populerkan dengan menuliskan dalam laporannya “Hindia” di mana ia kaitkan menggunakan kata Yunani “nesus” berarti pulau. Lalu, seorang pelukis asal Jerman yang telah lama menetap di Indonesia, khususnya daerah Yogyakarta dan Bali bernama Walter Spies. Beliau juga kerap dikenal sebagai pelopor modernisasi seni rupa di Bali.<sup>34</sup>

Disamping sejarahnya yang panjang, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jerman resmi terjalin tahun 1952, kemudian diikuti dengan pembukaan kedutaan besar Jerman di Jakarta pada tahun yang sama. Hubungan ini menjadi

---

<sup>32</sup> “Kerja Sama Bilateral Indonesia,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, <https://kemlu.go.id/kebijakan/kerja-sama-bilateral> (10/26/2025, 17:44 WIB).

<sup>33</sup> Lisda Liyanti, “Indonesia - German Encounter: Cultural Studies Perspective,” paper presented at Proceedings of the 3rd International Conference on Language, Literature, Education, and Culture, ICOLLEC 2023, 25-27 October 2023, Bali, Indonesia, *Proceedings of the 3rd International Conference on Language, Literature, Education, and Culture, ICOLLEC 2023, 25-27 October 2023, Bali, Indonesia*, 2024, <https://doi.org/10.4108/eai.25-10-2023.2348272>.

<sup>34</sup> “History of Indonesia and German Relations,” The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin, <https://indonesianembassy.de/history/?utm> (10/26/2025, 20:10 WIB).

hubungan persahabatan terlama yang dilakukan Jerman dengan negara di luar Eropa. Hal ini terus berlanjut dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bonn tahun 1954 serta di Jerman Timur tahun 1976. Hubungan diplomatik keduanya terus bertahan meski Jerman sempat mengalami perpecahan menjadi dua negara, namun diperkuat kembali usai penyatuan Jerman pada tahun 1990, di mana kedutaan Indonesia yang sebelumnya bertempat di Bonn kini berpindah ke Berlin sebagai ibu kota baru dari Republik Federal Jerman.<sup>35</sup>

Tidak hanya itu, terdapat sejarah kuat antar masyarakat keduanya yang memainkan peran sangat penting sebagai penopang diplomasi formal negara. Salah satu aktor non-negara yang secara konsisten berkontribusi dalam memperkuat relasi Indonesia dengan Jerman adalah *Deutsch-Indonesische Gesellschaft* (DIG) atau dapat diartikan sebagai Perhimpunan Jerman-Indonesia. DIG ini sendiri didirikan pada tahun 1950, pada saat itu belum ada hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Jerman. Mulanya, DIG ini hanya berfungsi sebagai forum dialog antara para ahli, khususnya antara Jerman dan Hindia Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, DIG menjadi tempat pertemuan yang tidak hanya diperuntukkan bagi para ahli akademis, tetapi bagi mereka yang tertarik pada budaya. Ditambah lagi, perkumpulan ini juga berkontribusi pada hubungan budaya, politik, dan juga ilmiah antar kedua negara. Seorang profesor dari Universitas Cologne, Dr. Hilgers-Hesse, bersama dengan Otto Karow berhasil menerbitkan Kamus Indonesia-Jerman pertama. Sejatinya, kehadiran DIG ini sendiri datang dari

---

<sup>35</sup> Hans-Joachim Freisleben and Helga Petersen, *500 Jahre Deutsch-Indonesische Medizingeschichte* (n.d.), <https://www.blickinsbuch.net/go.php?id=4119737878&ean=9783896452283>.

kesadaran bahwasannya hubungan antar pemerintah seringkali hanya bersifat kaku dan terbatas pada kepentingan politik-ekonomi mereka semata.<sup>36</sup>

Dengan begitu, hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Jerman telah berkembang dari hubungan diplomatik formal semata menjadi sebuah kemitraan komprehensif. Kerja sama selama kurang lebih tujuh dekade ini menjadi bukti nyata atas komitmen yang telah terjalin antara kedua negara dalam memperkuat hubungan politik, ekonomi, pendidikan, pembangunan, teknologi, sumber daya manusia serta budaya.<sup>37</sup>

## **2.2 Paradiplomasi Pemerintah Daerah Kota Bandung**

### **2.2.1 Penyebab dari Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung**

Adanya fenomena paradiplomasi tidaklah muncul begitu saja melainkan dorongan dari berbagai faktor. Dan pemicu dari keterlibatan aktor sub nasional dalam aktivitas paradiplomasi dapat dilihat melalui dua kategori utama. Penyebab pertama berupa eksternal atau universal, yaitu faktor global yang mempengaruhi percepatan paradiplomasi oleh pemerintah daerah. Penyebab kedua adalah internal atau domestik, yang berawal dari kondisi politik, ekonomi, budaya, dan sejarah yang mana mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah ke luar negeri.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Deutsch-Indonesische Gesellschaft (DIG), "75 Jähriges Der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft e.v Kultur Im Dialog," <https://deutsch-indonesische-gesellschaft.de/2025/02/75-jahre-dig-koeln-veranstaltungen/>.

<sup>37</sup> R. Azhari et al., *60 Tahun Persahabatan Kota Bandung Kota Braunschweig*.

<sup>38</sup> Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*.

Secara lebih mendalam, faktor eksternal yang dimaksud yaitu pertama, globalisasi. Kehadiran fenomena globalisasi tersebut secara mendunia telah memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka melintasi batas negara tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah pusat. Alhasil, globalisasi telah menciptakan tempat bagi daerah untuk dapat berinteraksi langsung secara internasional. Selanjutnya, regionalisasi merujuk pada peran pemerintah daerah yang terus meningkat dalam berbagai bidang. Intinya, berupa kewenangan yang didelegasikan dari pusat kepada daerah dengan tujuan agar pelayanan publik dan interaksi luar negeri dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Terakhir, berupa domestikasi kebijakan luar negeri. Hal ini dapat terjadi dikarenakan isu-isu yang dulunya dianggap merupakan urusan domestik lokal sering kali menjadi agenda global sekarang ini. Dan adanya pergeseran tersebut mendorong pemerintah daerah untuk dapat terlibat secara aktif dalam forum internasional guna menangani isu-isu lokal tersebut.<sup>39</sup>

Di sisi lain, penyebab internal dari dalam negeri juga tidak dapat diabaikan. Salah satu pemicu utamanya adalah desentralisasi. Keadaan di mana pemerintah pusat memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk mengatur urusannya, sehingga memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam aktivitas internasional yang dilakukan. Selain itu, terdapat faktor seperti ketidakmampuan pemerintah pusat dalam hubungan luar negeri, sebab

---

<sup>39</sup> Anggi Koenjaini Putri, "Relasi Pusat-Daerah Dalam Paradiplomasi Bermotif Nasionalistik: Studi Kasus Skotlandia" (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023).

pemerintah pusat dianggap sangat lambat atau kurang memiliki keinginan politik dalam menangani isu-isu spesifik seperti masalah lingkungan hidup. Adanya kekosongan peran ini mendorong pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dan menjalin kerja sama internasional secara mandiri untuk mendapatkan solusi yang lebih relevan dan efektif dengan kondisi wilayahnya. Berikutnya berupa ketidakseimbangan pemerintah daerah, salah satu aspeknya dapat dilihat melalui kondisi ekonomi daerah tersebut. Di mana adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah dalam satu negara menjadikan daerah yang maju secara industri dan perdagangan merasa bahwa pasar domestik tidak lagi cukup. Sehingga daerah dengan potensi ekonomi yang besar harus melangkah ke luar negeri untuk mencari peluang pertumbuhan baru. Penyebab seperti inilah yang menjadikan paradiplomasi sebagai mekanisme tambahan untuk pembangunan ekonominya.<sup>40</sup>

Selanjutnya yaitu adanya rangsangan eksternal, yang mana menjadikan paradiplomasi tidak sepenuhnya inisiatif dari dalam saja melainkan didorong oleh faktor eksternal, seperti adanya program bantuan internasional atau rencana kerja sama yang ditawarkan oleh organisasi internasional. Dengan dorongan seperti ini memberikan alasan kuat bagi daerah untuk aktif menjalin hubungan luar negeri.<sup>41</sup> Penyebab internal lainnya berupa peran pemimpin

---

<sup>40</sup> Rezky Ramadhan Antuli et al., “Desentralisasi sebagai Instrumen Diplomasi: Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dalam Kerjasama Internasional di Kawasan Asia Tenggara,” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 4 (October 2025): 1143–53, <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i4.808>.

<sup>41</sup> Efie Baadilla and Dyah Ridhul Airin Daties, “Legalitas Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19,” *SASI* 27, no. 2 (June 2021): 206, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.543>.

daerah. Sebab, karakter personal dari kepala daerah atau ideologi dari partai yang berkuasa sangat menentukan arah dari kebijakan luar negeri daerah tersebut. Sebab hal itulah yang menentukan cepat atau menghambatnya intensitas keterlibatan daerah dalam urusan internasional.

### **2.2.2 Dasar Hukum Diplomasi Pemerintah Daerah Kota Bandung**

Dalam kasus Kota Bandung, Indonesia, pelaksanaan paradiplomasi oleh pemerintahan daerah tentunya tidak luput dari kerangka hukum yang berakar dari Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut memperjelas bahwa kerja sama yang dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan perundang-undangan.<sup>42</sup> Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwasannya pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, serta kewajiban kepada daerah otonomnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dalam pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, menjadi landasan bahwa kerja sama daerah bukan lagi sekedar opsi administratif daerah, akan tetapi merupakan keputusan strategis untuk menciptakan efisiensi dan juga efektivitas pelayanan publik yang diemban oleh pemerintah daerah.<sup>43</sup>

Melalui hubungan internasional yang kian meluas, peran pemerintah daerah sebagai aktor diplomasi diatur secara lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, yang mana

---

<sup>42</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

berfungsi untuk memastikan keselarasan dengan kepentingan nasional. Regulasi tersebut menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam hubungan luar negerinya, sekaligus menekankan bahwa pelaksanaan kerja sama internasional harus tetap berada dalam pantauan pemerintah daerah. Alhasil, setiap inisiatif kerja sama dengan pihak asing wajib mematuhi mekanisme prosedur yang berlaku demi terciptanya ketertiban hukum dan administrasi negara.<sup>44</sup>

Disamping itu, untuk memberikan kepastian teknis dalam operasionalisasi kerja sama lintas negara, pemerintah telah menetapkan suatu pedoman yang lebih terperinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, yang mana di dalamnya mengatur perihal tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri serta lembaga luar negeri. Peraturan tersebut mendefinisikan kerja sama daerah sebagai suatu kebersamaan, yang didasari pada pertimbangan efektivitas pelayanan publik serta prinsip saling menguntungkan. Regulasi ini dengan tegas membedakan antara peraturan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL), yang mana keduanya dibuat untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan publik yang berkualitas.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019, 3.

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020.

Barulah melalui tingkatan lokalnya, Pemerintah Kota Bandung memberikan komitmennya dalam tata kelola kerja sama daerah secara internasional melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Adanya regulasi hukum ini menjadi yang utama dalam pengelompokan kerja sama daerah secara terperinci ke dalam kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Tidak hanya itu, didalamnya juga secara jelas memberikan definisi terkait hak dan kewajiban daerah dalam berinteraksi dengan pihak ketiga maupun mitra luar negeri. Melalui peraturan ini, prinsip-prinsip pelaksanaan kerja sama dipertegas dengan mencakup aspek efektivitas, saling menguntungkan, serta kepastian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus daya saing Kota Bandung secara internasional.<sup>46</sup>

### **2.2.3 Motif Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam Kerja Sama *Sister City***

Dan sesuai dengan yang tercatat jelas dalam Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 dan juga RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 hingga 2023, Kota Bandung dalam kerja sama dengan mitra luar negeri, terutama dalam *sister city*, terdorong oleh beberapa motif utama. Diantaranya seperti ekonomi, budaya, politik, dan tata kelola lintas batas.<sup>47</sup> Dan melalui motif ekonomi tersebut, menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Bandung untuk pembangunan daerahnya. Dan

---

<sup>46</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2017.

<sup>47</sup> Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*.

dalam konteks ini, paradiplomasi menjadi wadah yang digunakan pemerintah daerah untuk menarik investasi asing dan membuka pasar global bagi produk lokal. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berupaya agar hubungan diplomatik yang dilakukan dapat memberikan keuntungan secara nyata, seperti peningkatan arus wisatawan mancanegara serta pengembangan peluang terhadap industri kreatif dan juga UMKM di Kota Bandung. Oleh sebab itu, kerja sama internasional tidak lagi sekedar simbol persahabatan semata, akan tetapi strategi untuk menaikkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal di tengah persaingan global yang kian meningkat.<sup>48</sup>

Selain ekonomi yang dijelaskan, terdapat motif budaya yang menjadi landasan dalam memperkuat keberlanjutan kerja sama *sister city*, seperti yang terjadi antara Kota Bandung dan mitranya Kota Braunschweig. Dalam kasus tersebut, Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan diplomasi budaya sebagai *soft power* untuk memperkenalkan identitas lokalnya secara mendunia. Hal tersebut terwujudkan melalui pertukaran pelajar, kolaborasi seni, dan peran aktif dari komunitas Masyarakat Jerman-Indonesia (*Deutsch-Indonesische Gesellschaft*) yang berperan untuk menjembatani kedua kota tersebut. Berikutnya terdapat motif politik, di mana partisipasi aktif forum internasional memberikan keuntungan strategis terhadap pemerintah daerah maupun kepemimpinan walikota yang tengah menjabat. Adanya keberhasilan dalam

---

<sup>48</sup> Ade Saputra Wiguna and Debby Arisandi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung," *MANABIS: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 3, no. 1 (March 2024): 22–29, <https://doi.org/10.54259/manabis.v3i1.2431>.

menjalin dan mempertahankan kerja sama luar negeri sering kali dijadikan pencitraan politik atau *city branding* untuk menegaskan posisi Kota Bandung.<sup>49</sup>

#### 2.2.4 Penginstitutionalan Paradiplomasi di Kota Bandung

Dengan mengukur tingkatan paradiplomasi yang telah dinstusionalisasikan di Kota Bandung. Terdapat beberapa indikator penting yang perlu untuk di cermati, antara lain pembentukan departemen atau unit khusus yang menangani urusan luar negeri, intensitas kunjungan resmi, pembukaan kantor perwakilan di luar negeri, dan kerja sama dengan delegasi pemerintah pusat. Dan apabila suatu daerah telah memenuhi salah satu dari yang disebutkan tersebut, maka paradiplomasi di wilayah itu telah bertransformasi dari hanya sebatas inisiatif politik menjadi sistem yang terstruktur.<sup>50</sup>

Dalam hal ini, di Kota Bandung sendiri, telah membentuk Bagian Kerja Sama di bawah sekretariat Daerah Kota Bandung. Adanya unit tersebut tidaklah sebatas secara administratif belaka, namun menjadi jembatan atau penggerak utama yang mengoordinasikan komunikasi antara dinas terkait dengan mitra asing.<sup>51</sup> Kehadiran kelembagaan ini semakin diperkuat dengan adanya landasan hukum Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kerja sama daerah. Regulasi itulah yang menjadi bukti bahwasannya pemerintah Kota Bandung tidak memandang adanya kerja sama

---

<sup>49</sup> Deutsch-Indonesische Gesellschaft (DIG), "75 Jähriges Der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft e.v Kultur Im Dialog."

<sup>50</sup> Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*.

<sup>51</sup> Christine Mugia Restu, *Wawancara Dengan Ketua Fasilitas Luar Negeri Bagian Kerja Sama Kota Bandung*, Kota Bandung, May 21, 2025.

paradiplomasi sebagai aktivitas tanpa arah, melainkan suatu mandat hukum dengan prosedur, hak, dan kewajiban yang jelas demi mendukung pembangunan daerah.<sup>52</sup>

## **2.2.5 Sikap Pemerintah Pusat Terhadap Pradiplomasi Pemerintah**

### **Daerah Kota Bandung**

Apabila dipandang melalui dimensi persepsi yang di usulkan oleh Kuznetsov dalam teorinya, pemerintah pusat tidak memandang paradiplomasi sebaga suatu ancaman atau tantangan yang membahayakan kedaulatan, akan tetapi suatu peluang bagi seluruh bangsa. Dan pandangan tersebut semakin diperkuat melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang secara langsung memberikan kewenangan pada daerah untuk berinovasi dan menjalin kerja sama demi mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, selama aktivitas paradiplomasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan politik luar negeri Bebas Aktif, pemerintah pusat akan tetap mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan koneksi globalnya untuk menarik investasi, pertukaran teknologi, hingga promosi budaya.<sup>53</sup>

Sementara itu, melalui dimensi praktisnya, pola hubungan antara pemerintah pusat dan Kota Bandung dalam melaksanakan paradiplomasinya termasuk dalam kategori pola kerja sama terkoordinasi. Dalam pola ini dijelaskan, daerah diizinkan berkembang namun tetap berada dibawah mekanisme pengawasan dan koordinasi yang ketat dari pusat. Hal ini dapat

---

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2017.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

dilihat dalam landasan hukum yang berlapis mulai dari Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 yang memastikan keselarasan diplomasi daerah dengan kepentingan nasional, hingga Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 yang memberikan panduan teknis tata kelola kerja sama. Dan dalam pelaksanaan paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Bandung terutama, mulai dari penyusunan LoI dan MoU hingga eksekusi program kerja, harus melalui konsultasi dan atas persetujuan dari kementerian terkait demi menjaga ketertiban administrasi negara.<sup>54</sup>

### **2.2.6 Konsekuensi Paradiplomasi Bagi Kepentingan Nasional**

Meski paradiplomasi telah memberikan dampak positif, salah satunya melalui rasionalisasi kebijakan luar negeri nasional. Namun, dilain sisi juga beresiko disintegrasi jika tidak dikelola dengan bijak. Dan di Indonesia sendiri, konsekuensi paradiplomasi cenderung mengarah pada dampak positif yang mana memperkuat kapasitas negara. Dan melalui teorinya, Kuznetsov berargumen bahwa keterlibatan aktor daerah menjadikan proses perumusan kebijakan luar negeri menjadi lebih rasional, efektif, dan efisien sebab didasarkan pada kebutuhan di lapangan. Pemerintah pusat kerap kali hanya berfokus pada isu politik dan keamanan sehingga mengabaikan isu praktis yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Kemudian, dari situlah paradiplomasi digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebagai contoh yaitu kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig yang berfokus pada solusi

---

<sup>54</sup> Jovanscha Qisty Adinda Fa, Arry Bainus, and Riswanda, "Evaluasi Kerja Sama Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul)," *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 350–60.

masalah perkotaan seperti *smart city* dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tidak hanya itu saja, paradiplomasi juga dapat menjadi tempat berdemokrasi yang luas dengan melibatkan banyak aktor dalam hubungan internasional. Dan dalam kasus Kota Bandung dan Kota Braunschweig, paradiplomasi melibatkan masyarakat sipil hingga komunitas budaya.<sup>55</sup>

Namun, Kuznetsov juga menekankan bahwasannya paradiplomasi yang digunakan oleh daerah juga dapat meningkatkan disintegrasi terhadap negara apabila digunakan sebagai panggung politik untuk menyuarakan pemisahan diri atau bahkan menentang kebijakan pusat yang dapat mengancam kedaulatan nasional.<sup>56</sup> Meski demikian, di Indonesia sendiri hal tersebut berhasil diatasi melalui regulasi yang ketat dan pola hubungan yang terkoordinasi. Hal ini dapat dilihat melalui paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Bandung di mana aktivitas internasionalnya justru memperkuat identitas nasional. Melalui diplomasi budaya hingga festival di Kota Braunschweig, Kota Bandung turut mempromosikan citra Indonesia secara mendunia. Dengan demikian, bagi Indonesia, paradiplomasi bukanlah ancaman melainkan penguat posisi negara secara global.

### 2.3 Kota Bandung Sebagai Aktor Paradiplomasi

Peran yang dimiliki Kota Bandung dalam kerja sama internasionalnya tidak dapat terlepas dari posisi historis juga simbolik di tingkat internasional. Kota ini

---

<sup>55</sup> Gilang Nur Alam and Arfin Sudirman, "Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama *Sister city*," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16, no. 1 (July 2020): 31–50, <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50>.

<sup>56</sup> Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*.

tidak hanya sekedar ibukota Jawa Barat, melainkan ruang diplomasi yang telah membangun reputasi sedari pertengahan abad ke-20. Dalam konteks paradiplomasi, Kota Bandung memanfaatkan jati dirinya tersebut untuk mengembangkan jejaring global melalui berbagai bentuk kemitraan kota dan partisipasi di dalam forum internasional. Hanya saja, penting untuk dicermati bahwa keberhasilan tersebut bukan sekedar keunikan yang dimiliki oleh Kota Bandung semata, melainkan disebabkan adanya kombinasi sejarah, kapasitas institusional, serta peluang politik yang mengizinkan pemerintah daerah untuk terlibat dalam urusan luar negeri.<sup>57</sup>

Salah satu fondasi historis yang paling menentukan dan terjaga hingga sekarang yaitu penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di tahun 1955. Dalam peristiwa yang mengumpulkan 29 negara Asia-Afrika ini, telah melahirkan *Spirit of Bandung* yang merupakan sebuah harapan dalam menolak kolonialisme dan memposisikan ulang Dunia Ketiga sebagai subjek hukum internasional yang setara.<sup>58</sup> Menjadikan Kota Bandung dapat dikenal secara luas oleh dunia. Secara historis, penggelaran KAA datang dari beberapa faktor, pertama, kota ini memiliki infrastruktur kolonial yang relatif maju untuk ukuran Indonesia pada saat itu. Kedua, suasana politik di Jawa Barat dianggap lebih stabil dibandingkan wilayah lainnya yang masih rentan akibat konflik pasca kemerdekaan. Ketiga, pemerintah pusat ingin menegaskan citra Kota Bandung sebagai kota modern dan berorientasi internasional. Warisan KAA ini telah dijadikan sebagai aset diplomasi kota yang

---

<sup>57</sup> Alin Arfia Ashari, *Paradiplomasi Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig Melalui Kerja Sama Sister city*, n.d.

<sup>58</sup> Luis Eslava, Michael Fakhri, and Vasuki Nesiah, "The Spirit of Kota Bandung," in *Kota Bandung, Global History, and International Law*, 1st ed., ed. Luis Eslava, Michael Fakhri, and Vasuki Nesiah (Cambridge University Press, 2017), 3–32, <https://doi.org/10.1017/9781316414880.003>.

unik oleh Pemerintah Kota Bandung, ditambah adanya *branding* sebagai Ibu Kota Asia Afrika telah menambah daya tarik dan juga nilai tawar yang kuat.<sup>59</sup>

Melalui legitimasi historis ini, Kota Bandung memperoleh *soft power* yang membedakannya dari kota-kota lain di Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional. Dalam praktiknya, paradiplomasi Kota Bandung dijalankan melalui berbagai instrumen, mulai dari kerja sama *sister city* hingga keterlibatan dalam jaringan kota global. Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan kerja sama internasionalnya sebagai sarana untuk mendukung pembangunan daerah, peningkatan sumber daya manusia, transfer pengetahuan, serta promosi budaya dan ekonomi kreatif. Disamping itu, terdapat juga beberapa sektor yang menjadi fokus utama dari kerja sama yang terjalin meliputi pendidikan, kebudayaan, teknologi, pariwisata, dan pengembangan kota cerdas (*smart city*). Dengan dimilikinya sejarah tersebut oleh Kota Bandung, telah menguatkan legitimasinya untuk tetap aktif menjalin kerja sama internasional dan berhasil membangun mekanisme kerja sama melalui Bagian Kerja Sama Luar Negeri, pemanfaatan forum jaringan kota, serta diplomasi kultural. Namun, hal tersebut juga dapat terpengaruhi faktor politik internal seperti pergantian kepemimpinan dengan prioritas berbeda. Sehingga, dapat memperkuat namun dilain sisi juga menghambat agenda kerja sama internasional Kota Bandung.<sup>60</sup>

Hingga saat ini, di tahun 2026, Kota Bandung tercatat memiliki tujuh belas mitra luar negeri mulai dari Braunschweig hingga Cotabato. Setiap kemitraan

---

<sup>59</sup> Indonesia.go.id, “Logo Baru 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika,” <https://indonesia.go.id/galeri/foto/detail/4426> (11/3/2025, 07:25 WIB).

<sup>60</sup> Ashari, “Paradiplomasi Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig Melalui Kerja Sama *Sister city*,” 2022.

tersebut tentunya memiliki karakteristik dan tingkat efektivitas yang berbeda-beda, tergantung pada kesesuaian kepentingannya, kapasitas institusi, serta komitmen politik dari masing-masing pihak. Dalam konteks ini, kerja sama *sister city* yang dilakukan Kota Bandung menunjukkan variasi dalam intensitas, keberlanjutan, dan hasil yang dicapai.<sup>61</sup>

**Tabel 2.1 Kerja Sama Kota Bandung dengan Mitra Luar Negeri Beserta Program yang di Kerja Samakan Tahun 2026**

Mitra Luar Negeri	Bidang Kerja Sama
Braunschweig	Teknologi, pendidikan, budaya, dan ekonomi
Namur	Teknologi, manajemen tata pemerintahan, lingkungan, pariwisata, budaya, sumber daya manusia, dan ekonomi
Melbourne	Pendidikan, budaya, pariwisata, <i>smart city</i> , dan ekonomi
Fort Worth	Ekonomi, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
Petaling Jaya	Ekonomi dan perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan
Suwon	Ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan ilmu pengetahuan
Seoul	<i>Smart city</i> , transportasi, pemerintahan digital, pariwisata, dan kebudayaan.
Yingkou	Perdagangan, investasi, kebudayaan, pendidikan, dan pertukaran teknologi
Liuzhou	Perdagangan, ekonomi, pendidikan, budaya, dan teknologi
Shenzen	Teknologi, ekonomi, pendidikan, dan inovasi <i>smart city</i>
Kawasaki	Manajemen limbah, manajemen kualitas udara, dan manajemen air
Hamamatsu	Pelatihan personil dalam bidang lingkungan, sanitasi, dan sistem penyediaan air
Toyota	Teknologi, lingkungan, pendidikan, administrasi, sumber daya manusia, dan pembangunan berkelanjutan

<sup>61</sup> Bagian Kerja Sama Kota Bandung, "Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri (KSDPL)," Bagian Kerja Sama Kota Bandung, <https://kerjasama-new.KotaBandung.go.id/ksdpl>.

Daegu	Ekonomi, pariwisata, budaya, perdagangan, peningkatan kapasitas, dan <i>smart city</i>
Nanning	Ekonomi dan perdagangan, sains dan teknologi, Kesehatan, pariwisata dan kebudayaan, dan Pendidikan dan pertukaran remaja.
Cuenca	Pengembangan bidang budaya, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi.
Cotabato	Pendidikan, budaya, dan ekonomi.

Sumber: Website Bagian Kerja Sama Kota Bandung ([https://kerjasama-new.Kota Bandung.go.id/ksdpl](https://kerjasama-new.KotaBandung.go.id/ksdpl))

Dalam pelaksanaan paradiplomasi Kota Bandung, terdapat beberapa mitra kerja sama *sister city* yang pernah terjalin, diantaranya Kota Braunschweig, Fort Worth, Namur, Melbourne, Petaling Jaya, Suwon, Seoul, Yingkou, Liuzhou, Shenzhen, Kawasaki, Hamamatsu, Toyota, Daegu, Nanning, Cuenca, dan Cotabato. Selain itu, Kota Bandung juga terlibat dalam kemitraan teknis untuk pengembangan *smart city*, kerja sama transportasi publik, pertukaran pendidikan, peningkatan kapasitas prosedur birokrasi, hingga kolaborasi budaya dan ekonomi kreatif. Dan masing-masing dari kemitraannya tentu memiliki dinamika serta tingkat efektivitas yang berbeda, salah satunya terpengaruh oleh komitmen politik, ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan kemampuan institusi mendapatkan peluang dalam kerja sama internasionalnya.<sup>62</sup>

Melalui sudut pandang kelembagaan, pelaksanaan paradiplomasi di Kota Bandung difasilitasi oleh Bagian Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Unit ini berperan dalam mengkoordinasikan antara pemerintah daerah dan dinas terkait dengan mitra luar negerinya. Meski demikian, efektivitas peran kelembagaan tersebut, sangat terpengaruhi oleh dukungan kepala daerah, baik

---

<sup>62</sup> Bagian Kerja Sama Kota Bandung, “Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri (KSDPL),” Bagian Kerja Sama Kota Bandung, [https://kerjasama-new.Kota Bandung.go.id/ksdpl](https://kerjasama-new.KotaBandung.go.id/ksdpl), (2/25/2026, 15:45 WIB).

dalam bentuk kebijakan, alokasi anggaran, maupun prioritas pembangunan.<sup>63</sup> Tanpa adanya dukungan politik yang kuat, paradiplomasi cenderung berjalan secara administratif dan seremonial semata, tanpa menghasilkan program kerja yang berkelanjutan untuk dikemudian hari. Secara keseluruhan, paradiplomasi yang dimiliki oleh Kota Bandung merupakan hasil kombinasi antara warisan sejarah, kemampuan institusional, dan kalkulasi politik kontemporer. Kota Bandung tidak hanya menggunakan identitas globalnya dari peristiwa KAA 1995, namun kerap aktif juga mengelaborasi makna tersebut melalui hubungan internasional yang beragam. Dan tantangan kedepannya yaitu untuk memastikan agar kerja sama yang terjalin tidak hanya sebatas simbolisme, akan tetapi benar-benar memperkuat kapasitas pembangunan kota secara keseluruhan.<sup>64</sup>

## **2.4 Kerja Sama *Sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig**

### **2.4.1 Sejarah Kerja Sama *Sister City* Kota Bandung dan Kota Braunschweig**

Awal mula dari kerja sama *sister city* kedua kota ini di inisiasikan oleh Georg Eckert sebagai seseorang yang berkecimpug dalam dunia pendidikan sekaligus kepala *Schulbuchinstitut* di Kota Braunschweig, bersama dengan seorang staff ahli kebudayaan indonesia untuk Jerman bernama Rochmat Hardjono tahun 1955. Keduanya membicarakan terkait kerja sama dalam bidang pendidikan, yaitu penyebaran buku pelajaran terbitan *Schulbuchinstitut*

---

<sup>63</sup> Bagian Kerja Sama Kota Bandung, "Latar Belakang Bagian Kerja Sama Kota Bandung," Bagian Kerja Sama Kota Bandung, <https://kerjasama-new.Kota.Bandung.go.id/latarbelakang> (2/25/2026, 15:48 WIB).

<sup>64</sup> Salsabila, "Faktor Hambatan Kerjasama *Sister city* Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig."

yang mana kemudian mendapat respon baik dari pemerintah Indonesia. Demi terjalannya kerja sama jangka panjang, Hardjono menyarankan agar kerja sama yang dilakukan nantinya bukan di tingkat negara lagi, melainkan tingkat kota. Dan dari sanalah teretusnya Kota Bandung sebagai salah satu pilihan, dengan alasan utama bahwa Kota Bandung memiliki perguruan tinggi sejenis dengan yang terletak di Braunschweig.<sup>65</sup>

Kemudian pada 24 Mei 1960, kerja sama kedua kota tersebut ditandatangani oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman, yaitu Dr. Zairin Zain dan Direktur Kota Hans-Günther Weber dengan didampingi Wali Kota Martha Fuchs di Braunschweig. Pada masa itu, menurut peraturan dan kebijakan luar negeri Indonesia, hubungan kerja sama harus dilakukan oleh Duta Besar. Itulah mengapa, menteri luar negeri pada saat itu menghimbau kepada duta besar untuk melakukan penandatanganan tersebut. Akibat dari keabsenan Wali Kota Bandung yang pada saat itu dijabat oleh bapak Priatnakusumah, ditanggal 2 Juni 1960 Georg Eckert bersama dengan Wali Kota Martha Fuchs mengunjungi Kota Bandung untuk bertemu dengan beliau. Alhasil, itulah awal mula kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig resmi dimulai.<sup>66</sup>

Pada 28 Mei 1965, Wali Kota Bandung berkesempatan untuk mengunjungi Kota Braunschweig dengan membawa beberapa perwakilan pemuda Kota Bandung diantaranya Rektor Universitas Padjajaran, Pro-Rektor Institut teknologi Kota Bandung, wakil ketua Universitas Sumatera Utara, Duta

---

<sup>65</sup> R. Azhari et al., *60 Tahun Persahabatan Kota Bandung Kota Braunschweig*.

<sup>66</sup> Ibid.

Besar (Dr. Loekman Hakim), *Generalkonsul* (Basorie), dan Wakil perdana Menteri (Dr. Chaerul Saleh). Bertempat di aula *Kant-Hoschule* (Sekolah Tinggi Kant) yang kini berganti nama menjadi *Technische Universität* (Universitas Teknik), Kota Braunschweig dilakukannya penandatanganan piagam persahabatan. Piagam tersebut menjadi sebuah simbol komitmen Kota Bandung dan Kota Braunschweig dalam menjaga hubungan baik demi tercapainya perdamaian dunia berlandas semangat persaudaraan. Kegiatan yang menandai persahabatan kedua kota tersebut kemudian dinamakan sebagai *Deutsche-Indonesische Woche*.<sup>67</sup>

Berkat kesuksesan yang diraih dalam *Deutsche-Indonesische Woche*, wakil ketua perhimpunan Jerman-Indonesia Dr. H. G. Weber kemudian menggelar acara serupa di tahun yang sama bertepatan dengan kunjungan para delegasi Kota Bandung di tanggal 28 Mei sampai 4 Juni 1965. Selama berlangsungnya kegiatan tersebut, terdapat sesi pengenalan Kota Bandung dalam bentuk pameran foto, buku, hingga barang kesenian. Foto yang dipamerkan kala itu berisikan Kota Bandung, kehidupan masyarakatnya, sudut kota dan kesenian tradisionalnya. Di waktu yang bersamaan, didirikanlah *Deutsch-Indonesische Gesellschaft* (perhimpunan Jerman-Indonesia) dengan dikepalai oleh Georg Eckert. Pada akhirnya, kegiatan bersejarah persahabatan Kota Bandung dan Kota Braunschweig tersebut menghasilkan beberapa rencana kerja, yaitu program pertukaran magang pegawai pemerintahan, program pertukaran pemuda, pekan kebudayaan, seni dan pariwisata, dan

---

<sup>67</sup> Ibid.

pameran Indonesia dengan tujuan untuk memamerkan produk unggulan Indonesia.<sup>68</sup>

Selama empat dekade tahun 1960 hingga 2000, hubungan diplomatik keduanya beroperasi di bawah naungan Piagam Persahabatan. Kemudian, Kota Bandung dan Kota Braunschweig menyepakati untuk melakukan revitalisasi kemitraan mereka, dengan adanya pertimbangan akan landasan hukum yang lebih kuat sehingga persahabatan keduanya diakui secara internasional. Oleh sebab itu, pada tanggal 19 Juni 2000 Kota Bandung dan Kota Braunschweig menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung, Tarmana bersama Wali Kota Braunschweig, Werner Steffens, dengan bidang kerja sama mencakup didalamnya yaitu ekonomi perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, kepemudaan dan keolahragaan. Selama periode kerja sama yang telah berlangsung, tercatat sejak tahun 2000 hingga 2024 sudah lebih dari tiga puluh empat jenis kerja sama telah terimplementasi di Kota Bandung.<sup>69</sup>

Diantaranya kerja sama tersebut sebagai berikut, pembangunan Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM), bantuan alat pemotong hewan, bantuan mobil VW Combi, bantuan mesin tik dan *slide projector*, penataan kota, bantuan alat kesehatan, kerja sama antara ITB jurusan seni rupa dengan perguruan tinggi seni rupa Kota Braunschweig, program redaktur radio (2 orang), program pelatihan hotel dan gastronomi (3 orang), program pelatihan

---

<sup>68</sup> Deutsch-Indonesische Gesellschaft (DIG), “75 Jähriges Der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft e.v Kultur Im Dialog.”

<sup>69</sup> Alam and Sudirman, “Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama *Sister city*.”

perawat, bantuan bagi perguruan tinggi, bantuan survey penataan kali Cikapundung, pelatihan perungkatan sumber daya manusia Pemerintah Kota Bandung, bantuan bencana alam tsunami, pertukaran pemuda atau siswa, magang pejabat Pemerintah Kota Bandung, penampilan tari kesenian, pameran dagang atau *Expo Hannover*, rencana pembaharuan MoU dan mengaktifkan kembali kerjasama terutama di bidang ekonomi dan pariwisata, menghadiri undangan perayaan ke-50 tahun Masyarakat Indonesia-Jerman (DIG), penampilan tim kesenian Kota Bandung pada perayaan ke-50 tahun Masyarakat Indonesia-Jerman (DIG), *best practices* manajemen perpustakaan Kota Braunschweig, *second conference of municipal partnership with Asia in Bonn*, kunjungan ke Kota Braunschweig mengenai manajemen kepegawaian dan penanggulangan bencana, pelaksanaan *Little Kota Bandung Festival* di Kota Braunschweig, menghadiri kegiatan Kota Braunschweig *Culture Night* serta diskusi lebih lanjut mengenai perayaan 60 tahun persahabatan Kota Bandung-Kota Braunschweig, kunjungan mahasiswa HBK Kota Braunschweig untuk mengikuti acara 3 tahunan di ITB, sosialisasi program *Senior Experten Services* dalam rangka rencana pendampingan teknis bagi Pemerintah Kota Bandung, pembuatan buku 60 tahun Kota Bandung-Kota Braunschweig, *third conference of municipal partnership with Asia*, peresmian Jembatan Kota Bandung di Kota Braunschweig, sosialisasi 60 tahun kerja sama Kota Bandung-Kota Braunschweig, kunjungan ke Kota Braunschweig, Jerman dalam rangka pembahasan pembaharuan MoU, penerimaan mahasiswa magang dari Kota Braunschweig, Jerman ke Kota Bandung yang akan melaksanakan program

magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kota Braunschweig *Cultural Night*, dan kunjungan delegasi masyarakat Kota Braunschweig ke Kota Bandung.<sup>70</sup>

#### **2.4.2 Pelaksanaan Program Kerja Sama *Sister City* Kota Bandung dan Kota Braunschweig**

Pengimplementasian dari MoU tahun 2000 tentunya tidak selalu berjalan mulus, dalam aktivitas kerja samanya, kedua kota ini sempat mengalami kondisi stagnan, di mana hubungan yang telah diperbaharui secara hukum tersebut mengalami kesendatan beberapa tahun. Dan untuk mengatasi kondisi tersebut, kedua kota kemudian menyetujui untuk menandatangani *Minutes of Meeting* pada tanggal 17 Februari 2016, sebagai suatu reafirmasi komitmen antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig. Salah satu kepentingan paling utama yang dimiliki Kota Bandung dalam mempertahankan sekaligus memperkuat kerja samanya yaitu dengan mendukung ambisi Kota Bandung demi mewujudkan *Smart City*. Yang mana merupakan salah satu langkah paling strategis, mengingat bahwasannya Kota Braunschweig merupakan pusat penelitian dan pengembangan ilmiah.<sup>71</sup>

**Tabel 2.2 Daftar Program Kerja Sama Yang Dilakukan Kota Braunschweig dan Kota Bandung Periode 2016-2023**

Tahun	Program Kerja Sama
2016	Kunjungan delegasi resmi dari Kota Braunschweig ke Kota Bandung

<sup>70</sup> Bagian Kerja Sama Kota Bandung, *Daftar Rekapitulasi Kerja Sama Pemkot Kota Bandung Dengan Mitra Kerja Sama Luar Negeri Atau Sister city Tahun 2024*.

<sup>71</sup> Bagian Kerja Sama Kota Bandung, *Minutes of Meeting Kota Bandung and Kota Braunschweig (2016)*.

2017	Kunjungan delegasi Kota Bandung ke Kota Braunschweig
2019	Kunjungan mahasiswa <i>Hochschule für Bildende Künste</i> (HBK) Kota Braunschweig ke ITB
2020	Peringatan ulang tahun Kota Bandung ke 210 dan 60 tahun <i>sister city</i> Kota Bandung dan Kota Braunschweig
2021	Penanaman Jembatan Kota Bandung dalam rangka memperingati 60 tahun kota kembar
2022	Kunjungan delegasi Kota Bandung ke Kota Braunschweig dan pelatihan magang dari Kota Braunschweig ke Kota Bandung
2023	Penyelenggaraan Kongres Esperanto Jerman ke 100 di Braunschweig dengan peserta dari Kota Bandung

**Sumber: Annual Report Kota Braunschweig-Kota Bandung Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.**

Dalam kunjungan yang dilakukan Kota Braunschweig ke Kota Bandung pada 16 hingga 19 Februari 2016 atas undangan dari Wali Kota Ridwan Kamil ini dihadiri oleh Wali Kota Annegret Ihbe dengan didampingi oleh Gerold Leppa, Kepala Urusan Ekonomi, Wolfgang Sehrt, Kepala Asosiasi Air Limbah Kota Braunschweig dan Presiden Himpunan Indonesia-Jerman, serta Perta Havemann, Kepala Perwakilan atau Hubungan Internasional di Departemen Pengarah Kota Braunschweig.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Kota Braunschweig Löwenstadt, *Annual Report Kota Braunschweig-Kota Bandung Tahun 2016* (Kota Braunschweig, 2016).

**Gambar 2.1 Kunjungan Delegasi Resmi dari Kota Braunschweig ke  
Mitra *Sister city* Kota Bandung**



**Sumber: Laporan tahunan *sister city* Kota Braunschweig Tahun 2016**

Tujuan dari kunjungan delegasi ini sendiri adalah untuk memperkuat hubungan *sister city* tertua ini melalui diskusi terkait peluang pertukaran agar mendapatkan gambaran besar mengenai situasi sosial, administratif, ilmiah, dan ekonomi di Kota Bandung.<sup>73</sup>

**Gambar 2.2 Pemberian Cenderamata Terhadap Walikota Ihbe oleh Dr.  
Shaleha, Perwakilan dari WaliKota Bandung**



**Sumber: Laporan tahunan *sister city* Kota Braunschweig Tahun 2016**

Selanjutnya, pada tahun 2017, lebih tepatnya 10 hingga 17 Desember 2017, Bapak Gunadi Sukma Binekas selaku Kepala Departemen Sumber Daya

---

<sup>73</sup> Ibid.

Manusia Kota Bandung dan Bapak Hari Setiadi selaku Kepala Asosiasi *sister city* Kota Bandung-Kota Braunschweig, mengunjungi Kota Braunschweig dari Kota Bandung, Indonesia. Disana, para delegasi mempelajari terkait perkembangan bisnis di Kota Braunschweig.<sup>74</sup>

**Gambar 2.3 Walikota Ihbe Menyambut Para Tamu**



**Sumber: Laporan tahunan *sister city* Kota Braunschweig Tahun 2017**

Melalui gambar tersebut, dari arah kiri hadir Bapak Gunadi Sukma Binekas, Ibu Annegret Ihbe, Bapak Hari Setiadi, dan Wakil Konsulat Jenderal dari Hamburg, Bapak Singghii Yuwono hadir dengan beberapa perusahaan *start-up* Kota Braunschweig di Departemen Pengembangan Ekonomi, para delegasi melakukan kunjungan langsung ke program pelatihan di Administrasi Sumber Daya Manusia dan juga pelatihan pemadam kebakaran.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Kota Braunschweig Löwenstadt, *Annual Report Kota Braunschweig-Kota Bandung Tahun 2017* (Kota Braunschweig, 2017).

<sup>75</sup> Ibid.

**Gambar 2.4 Para Delegasi Resmi Mengunjungi Pusat Pelatihan  
Pemadam Kebakaran**



**Sumber: Laporan tahunan *sister city* Kota Braunschweig Tahun 2017**

Pada tahun berikutnya, tepatnya di tanggal 5 hingga 22 Desember 2019, kelas film dari Universitas *Hochschule für Bildende Künste* (HBK) Kota Braunschweig, yang dipimpin oleh Profesor Michel Bryntrup melakukan kunjungan singkat ke Indonesia, di mana lembaga mitra HBK yaitu Institut Teknologi Kota Bandung (ITB) berada. Bersama dengan beberapa mahasiswa Intermedia Studio, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, mereka mengikuti lokakarya sekaligus mengenal *sister city* Kota Braunschweig.<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Kota Braunschweig Löwenstadt, *Annual Report Kota Braunschweig-Kota Bandung Tahun 2019*.

## **Gambar 2.5 Pertemuan Mahasiswa HBK dan ITB dengan WaliKota**

### **Bandung Oded M. Danial di Balai Kota**



**Sumber: Laporan tahunan *sister city* Kota Braunschweig Tahun 2019**

Di tahun 2020, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 210 berdirinya Kota Bandung, Wali Kota Ulrich Markuth mengirimkan sebuah pesan video pada Kota Bandung dibulan Agustus yang berisi ucapan selamatnya kepada Kota Bandung dan juga warganya serta mengumumkan bahwa Kota Braunschweig menantikan kerja sama lebih lanjut dengan Kota Bandung serta peringatan 60 tahun *sister city* diantara kedua kota yang mana terpaksa harus ditunda akibat adanya pandemi.<sup>77</sup>

## **Gambar 2.6 Potongan Gambar dari Pesan Video Walikota Ulrich**

### **Markuth**



**Sumber: Laporan tahunan *sister city* Kota Braunschweig Tahun 2020**

<sup>77</sup> Kota Braunschweig Löwenstadt, *Annual Report Kota Braunschweig-Kota Bandung Tahun 2020*.

Memasuki tahun 2021, Kota Braunschweig melakukan penamaan untuk jembatan Kota Bandung dalam rangka memperingati 60 tahun kerja sama *sister city* dengan Kota Bandung. Bekas dari jembatan Werkstättenweg di Bürgerpark telah dibuka secara seremonial pada tanggal 18 Juni 2021, sebagai tanda untuk ulang tahun ke-60 *sister city* antara Kota Braunschweig dan Kota Bandung dan berganti nama menjadi Jembatan Kota Bandung.<sup>78</sup>

**Gambar 2.7 Peresmian Jembatan Kota Bandung di Kota Braunschweig**



**Sumber: Laporan tahunan *sister city* Kota Braunschweig Tahun 2021**

Didampingi oleh Ardian Wicaksono selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hamburg dan Wolfgang Sehrt sebagai Presiden Perhimpunan Masyarakat Jerman-Indonesia di Lower Saxony, dan Wali Kota Annegret Ihbe berhasil meresmikan sebuah batu besar bertuliskan nama baru dari jembatan tersebut dengan diiringi musik Indonesia dan juga tarian khas Bali.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Kota Braunschweig Löwenstadt, *Annual Report Kota Braunschweig-Kota Bandung Tahun 2021* (Kota Braunschweig, 2021).

<sup>79</sup> Ibid.

Pada kunjungan di tahun 2022, lebih tepat pada 19 September, delegasi Kota Bandung yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan, mengunjungi Kota Braunschweig bersama para delegasi lainnya dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Investasi dan Layanan Komprehensif, Departemen Kerja Sama Internasional, dan direktur pelaksana perusahaan air kota, mereka menggabungkan kunjungan “Festival Indonesia” di Frankfurt dengan menginap di Kota Braunschweig untuk mengunjungi Jembatan Kota Bandung yang diresmikan pada 2021 di Bürgerpark.<sup>80</sup>

**Gambar 2.8 Delegasi Kota Bandung Mengunjungi Jembatan Kota Bandung**



**Sumber: Laporan tahunan *sister city* Kota Braunschweig Tahun 2022**

Dan pada bulan Oktober dan November tahun 2022, mahasiswa asal Braunschweig telah menyelesaikan program magangnya yang ia lakukan sebagai bagian dari program studi ganda dengan Kota Braunschweig di pemerintahan Kota Bandung. Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Marilyn

---

<sup>80</sup> Kota Braunschweig Löwenstadt, *Annual Report Kota Braunschweig-Kota Bandung Tahun 2022* (Kota Braunschweig, 2022).

bertanggung jawab untuk mengajikan acara-acara yang tengah berlangsung melalui platform media sosial. Selain itu, tugasnya juga untuk meliputi acara yang berlangsung serta mempublikasikannya melalui laman web dan media sosial Kota Bandung.<sup>81</sup>

Kemudian, pada program kerja di tanggal 26 Mei hingga 2 Juni 2023 ini, Asosiasi Esperanto Jerman menyelenggarakan Kongres Esperanto Jerman ke 100 di Kota Braunschweig. Esperanto ini sendiri merupakan bahasa internasional yang digunakan oleh komunitas penutur aktif di seluruh dunia dan melambangkan solidaritas dan rasa hormat terhadap bahasa dan budaya di dunia.<sup>82</sup>

**Gambar 2.9 Penyelenggaraan Kongres Esperanto Jerman ke-100 di Braunschweig dengan Peserta dari Kota Bandung**



**Sumber: Laporan tahunan *sister city* Kota Braunschweig Tahun 2023**

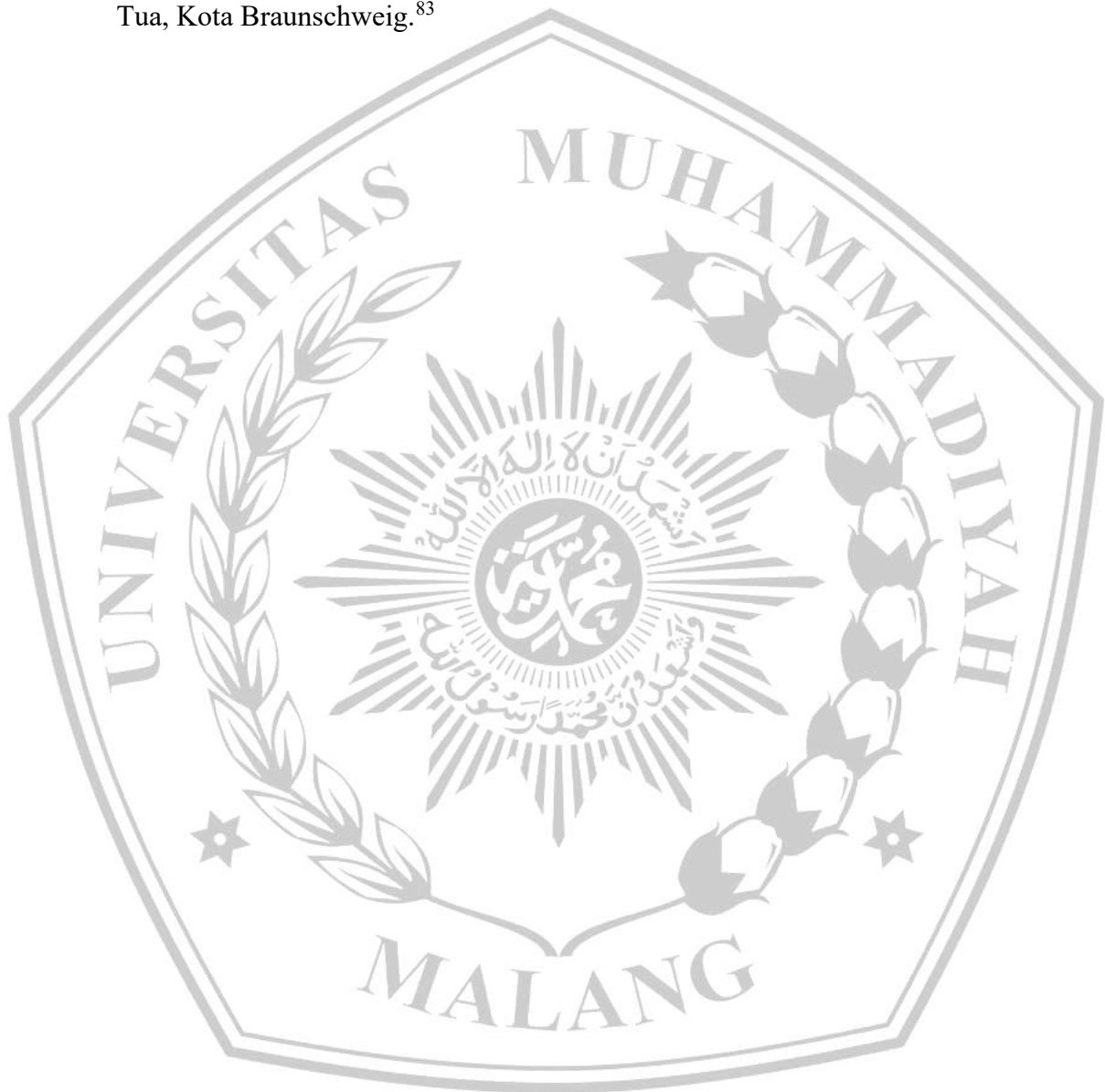
Melalui foto tersebut, dari sebelah kiri telah hadir Michaela Stegmaier, Ulrich Bradenburg (Ketua Federasi Esperanto Jerman), Sri Maryani (Mantan

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Kota Braunschweig Löwenstadt, *Annual Report Kota Braunschweig-Kota Bandung Tahun 2023* (Kota Braunschweig, 2023).

Duta Besar dari Kota Bandung, Indonesia), Profesor Dr. Duncan Charters (Ketua Federasi Esperanto Dunia) dan Cristina Antonelli-Ngameni. Kelimanya tengah menghadiri hari jadi ke-100 Kongres Esperanto di Dornse Balai Kota Tua, Kota Braunschweig.<sup>83</sup>



---

<sup>83</sup> Ibid.